



PENGELOLAAN SAMPAH TIDAK OPTIMAL Perlu Edukasi dan Sanksi Tegas

YOGYA (KR) - Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Korwil DIY menggelar saresahan dengan tema 'Pengelolaan Sampah dan Partisipasi Masyarakat'. Dalam diskusi muncul wacana perlunya sanksi tegas pada pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya.

"Sarasehan digelar mengingat banyaknya kebijakan Walikota Yogya terkait pengelolaan sampah, namun peran masyarakat dirasa belum optimal," tutur Ketua Eksekutif LP KPK DIY Sarmidi SPd MSi kepada *KR*, Senin (2/2).

Selain itu disampaikan perlukah membatasi jumlah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga? Dari catatan setiap orang rata-rata membuang sampah 0,7 kg. "Jika ditekan setiap rumah tangga hanya membuang sampah 0,5 kg maka ini juga akan



KR-Juvintarto

Suasana Sarasehan LP KPK DIY Pengelolaan Sampah dan Partisipasi Masyarakat.

mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke Depo. Kapasitas dan desain depo ini perlu disempurnakan," paparnya.

Sarasehan yang digelar LP-KPK DIY, Sabtu (30/1) di Gedung DPD DIY menghadirkan Narasumber Muhammad Sofyan ST (DPRD Kota Yogyakarta), Hery Setiawan SSi MSi (Pengurus Daerah Muhammadiyah, Majelis Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta) dan Agus Hartono Ss (pemerhati

lingkungan). Dengan moderator Arnabun SE (Dosen UAD, Sekretaris LP KPK Korwil DIY). Dengan Ketua Panitia Ir Sudarman.

"Pengelolaan sampah diatur dalam Perda No 9 Tahun 2024 Kota Yogyakarta, yang mengatur secara tegas peran masyarakat dan sanksi. Namun pelaksanaannya belum optimal karena ada rasa tidak tega untuk menerapkan sanksi secara tegas," papar Sofyan. **(Vin)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005